

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel yang digunakan	Hasil
Muhammad Hidayat, Lapeti Sari, dan Nobel Aqualdo (2011)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru	Regresi Linear berganda	Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen: 1. Investasi 2. Ekspor 3. Tenaga Kerja 4. Infrastruktur jalan	Ekspor, investasi, tenaga kerja dan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru
Teguh Ariefiantoro dan Wyati Saddewisasi (2012)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang	Regresi Linear berganda	Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen: 1. Pertumbuhan penduduk 2. PMA 3. PMDN 4. Infrastruktur jalan	Pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Semarang, sedangkan PMA dan PMDN tidak berpengaruh secara signifikan
Nur Mustar Muazi dan Fitri Arianti (2012)	Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1990-2010	Regresi, model dinamis pendekatan ECM (<i>Error Correction Model</i>)	Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen: 1. PMA 2. PMDN	penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

<p>Walewangko, E. N dkk (2015)</p>	<p>Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Dan Sektor Jasa-Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado</p>	<p>regresi linier berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Variabel dependen: PDRB</p> <p>Variabel independen: 1.sektor perdaganagn hotel, restoran 2. sektor jasa 3. Tenaga Kerja</p>	<p>Variable Sektor perdagangan, hotel, restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Manado. Dan variabel sector jasa-jasa mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB Kota Manado.</p>
<p>Aryo Munanda (2015)</p>	<p>Analisis Pengaruh Sektor Industri dan <i>Regional Spillover</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi studi kasus Kabupaten Sleman Tahun 1999-2013</p>	<p>regresi linier berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman</p> <p>Variabel independen: 1.Jumlah Mahasiswa Kabupaten Sleman 2.Jumlah Industri Kabupaten Sleman 3. Jumlah Hotel Kabupaten Sleman 4. pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten 6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang</p>	<p>Variable jumlah mahasiswa, jumlah hotel, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, variable jumlah industri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, ataupun apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (*Lincoln Arsyad, 1999*).

Penggunaan PDRB sebagai variable independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

2.2.1.1 Metode Perhitungan PDRB

I. Metode Langsung

1. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian.

Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = Y_{t-1} + P_t Q_t$$

Dimana :

Y = produk nasional atau produk nasional bruto (GNP atau GDP)

P = harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n

Q= jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n

1. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
- b. Keuntungan perusahaan (*corporate profit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profit taxes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

- c. Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, misalnya petani, *self employed profesional*, dan lain-lain. dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental business dan residential properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan *royalties* yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya.

Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Ynr dan Ynd = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas out put yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

II. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlakudan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan

karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi) belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999).

1. Teori Klasik

Ahli ekonomi klasik yakin dengan adanya perekonomian persaingan yang sempurna maka seluruh sumber ekonomi dapat dimanfaatkan dengan maksimal atau full employment. Para ahli ekonomi klasik menyatakan bahwa full

employment itu hanya bisa dapat dicapai apabila perekonomian bebas dari campur tangan pemerintah dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Semua kaum klasik memandang bahwa penumpukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah besar, selain itu mereka juga berpendapat bahwa keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan merangsang investasi, semakin besar keuntungan dan akan semakin besar pula akumulasi modal investasi.

2. Teori Ricardian

David Ricardo mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dalam bukunya *The Principles Of Political Economy And Taxation*. David mengungkapkan bahwa faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah buruh, pemupukan modal, perdagangan luar negeri. Seperti ahli ekonomi modern, teori Ricardo menekankan pentingnya tabungan untuk pembentukan modal. Dibanding pajak David Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui tabungan. Tabungan dapat diperoleh dengan penghematan pengeluaran, memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi harga barang.

3. Teori Harodd – Domar

Model pertumbuhan Harodd – Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Harodd – Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, mengenai watak ganda yang dimiliki

oleh investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan kedua ia memperbesar kapasitas produksi pertanian dengan cara menaikkan stok modal. Karena itu selama investasi netto tetap berjalan, pendapatan nyata dan out put akan senantiasa tambah besar Harodd – Domar (Suryana, 2000) mengembangkan analisa Keynes yang menekankan perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi yang baru.

2.2.2 Teori Investasi

Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku (i), tingkat pengembalian (rate or return), dari barang modal, dan prospek proyek investasi Menurut Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Tingkat bunga rendah, maka investasi

akan tinggi dan sebaliknya. Penjelasan diatas dapat diringkas dengan persamaan sebagai berikut :

$$I = f (r) (1)$$

Bunga merupakan fungsi Investasi

Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi pada tingkat bunga riil r . Investasi bergantung pada tingkat bunga riil karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi miring ke bawah: ketika tingkat bunga naik, semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan (Mankiw, 2000). Mengenai pembentukan kapital yang dianggap penting untuk adanya perkembangan, adalah sebagai berikut : Misalnya kesempatan untuk investasi bertambahkatakanlah karena ada kemajuan teknologi. Tambahnya permintaan untuk investasi akan menyebabkan tingkat bunga naik yang selanjutnya akan menaikkan jumlah tabungan. Dengan adanya kenaikan investasi, harga-harga barang kapital juga akan naik. Selanjutnya karena kenaikan-kenaikan tingkat bunga dan harga-harga barang kapital, maka investasi selanjutnya terbatas pada proyek-proyek yang dapat memberikan keuntungan terbesar. Bila proyek-proyek tersebut telah terlaksana maka permintaan terhadap investasi berkurang sehingga tingkat bunga dan harga barang-barang capital turun kembali. Setelah itu maka proyek-proyek yang kurang menguntungkan menjadi menguntungkan lagi dan seterusnya. Akhirnya tingkat bunga sudah menjadi begitu rendahnya, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menabung. Pada tingkat perkembangan itu akumulasi kapital berakhir dan perekonomian mengalami suatu keadaan yang statis. Dengan tidak

adanya akumulasi kapital berarti tidak ada perkembangan. Agar tidak mengalami keadaan yang statis tersebut, maka pengerjaan penuh (*full employment*) harus selalu dijaga selama proses akumulasi kapital. Pemerintah harus mengadakan proyek-proyek pekerjaan umum (*public works*). Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan perubahan teknologi menurut Neo-Klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh atau relatif lebih bersifat “penghematan buruh” (*labor saving*) daripada “penghematan modal” (*capital saving*). Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang modal.

Investasi juga dapat diartikan berbagai cara atau upaya penambahan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada saatnya nanti pemilik modal tersebut akan mendapat sejumlah keuntungan yang diharapkan dari hasil penanaman modal tersebut.

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse (Jhingan, 1999), lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Proses pembentukan

modal tersebut membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional.

2.2.2.1 Macam-macam Investasi

Macam-macam investasi berdasarkan pelaku investasi dapat dibedakan sebagai berikut (Sobri, 1987) :

a. Investasi Pemerintah (*Public Investment*)

Public investment umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan dan sebagainya. Investasi-investasi seperti ini sering disebut dengan social overhead capital (SOC). Keuntungan bagi investasi-investasi ini baru terasa apabila muncul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, yang juga menaikkan pendapatan, akan memberikan keuntungan bagi produk investasi.

b. Investasi Swasta (*Private Investment*)

Private investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah dan pada akhirnya bertambah pula efektif demand. Investasi yang ditimbulkan oleh sebab

bertambahnya permintaan yang bersumber investment mungkin dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

c. Investasi Pemerintah dan Swasta

Jenis investasi yang dilakukan oleh pihak publik dan swasta adalah investasi luar negeri (*foreign investment*). Foreign investment terjadi dari selisih antara ekspor di atas impor (X-M), induced investment dalam hal (X-M) adalah disebabkan oleh dari penambahan permintaan disebut induced investment. Induced perkembangan ekonomi di luar negeri. Istilah investasi asing menurut definisi IMF Balance of Payment Manual (Edisi, yang juga digunakan Bank Indonesia adalah investasi langsung yang mengarah pada investasi asing untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dari penanaman modal tersebut). Sementara penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Istilah “manfaat yang cukup lama tersebut” merupakan investasi yang pengelolaannya hanya memerlukan pengawasan. Dalam definisi tersebut tidak termasuk investasi portofolio di Indonesia, investasi seperti ini masih sangat kecil dan modal pinjaman yang telah masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sejak 1996. (Jhingan 1999)

3. Peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi

Di berbagai negara, terutama di negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat volatile yaitu selalu

mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dari fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Di samping itu perlu diingat kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja meningkat pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jhingan 1999). Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian :

- a. Investasi merupakan salah satu komponen agregat maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, peningkatan ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa depan, dan perkembangan ini akan menstimular pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga perkembangan teknologi akan memberikan sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah :

1) Suku Bunga

Untuk memperoleh modal diperlukan bunga, perusahaan mempunyai dua sumber pembiayaan yaitu dari keuntungan yang tidak dibagikan dan dari meminjam. Apabila keuntungan yang tidak dibagikan tersebut tidak diinvestasikan tetapi didepositokan maka perusahaan akan mendapatkan

bunga, sedangkan bila perusahaan melakukan investasi dengan meminjam di bank maka ia harus membayar bunga. Dengan demikian apakah ia akan meminjam pada bank ataukah menggunakan dana sendiri. Oleh karena itu bunga perlu dipandang sebagai suatu biaya penting untuk memperoleh barang modal.

2) Depresiasi

Setiap barang modal akan didepresiasi, dalam prakteknya depresiasi dilakukan secara bertahap yaitu barang modal dikurangi sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Pengurangan barang modal ini merupakan biaya bagi perusahaan.

3) Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang semakin meningkat akan memerlukan barang modal yang semakin banyak. Dengan demikian perusahaan harus melakukan investasi yang lebih tinggi dan lebih banyak modal yang diperlukan.

4) Kebijakan Pemerintah

Sikap pemerintah dalam kegiatan usaha sangat penting perannya dalam kegiatan investasi pemerintah. Pajak, keuntungan yang tinggi, hambatan dalam memperoleh pinjaman/devisa untuk mengimpor barang modal akan mengurangi gairah sector perusahaan untuk berinvestasi.

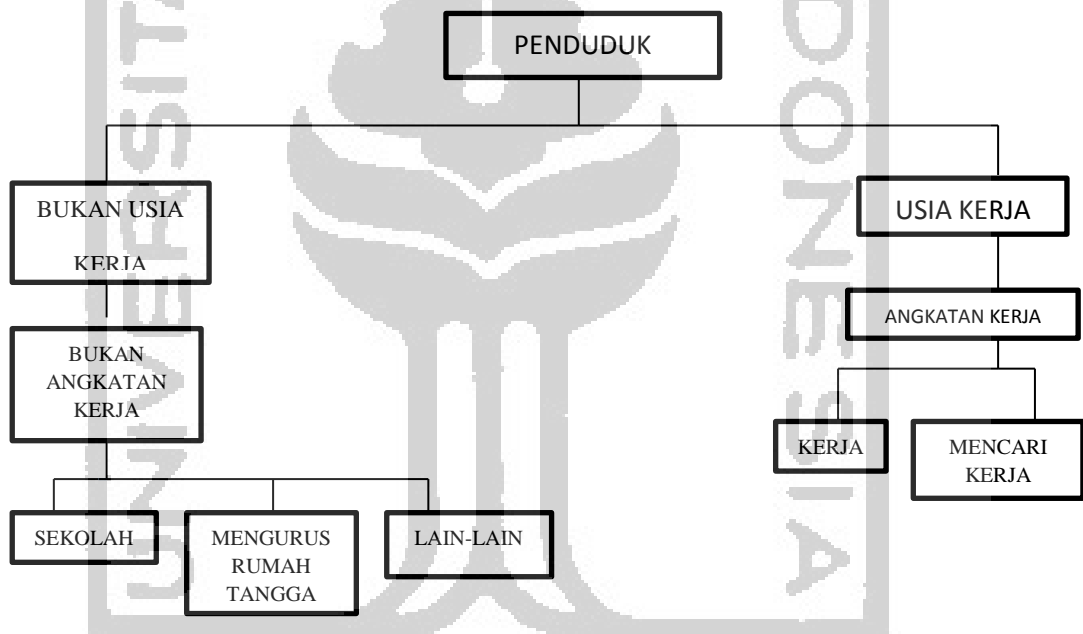
2.2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Definisi tenaga kerja memang berbeda-beda tapi sebenarnya memiliki inti yang sama yaitu penduduk yang dirinya sudah siap untuk bekerja. Definisi tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang potensial memproduksi barang dan jasa. Undang-undang No. 25 tahun 1997 menyebutkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berumur 15 tahun atau lebih yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan yang sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan (Disnaker, 2006). Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu tidak bekerja hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja (Disnaker, 2006). Untuk menentukan angkatan kerja maka dibutuhkan informasi mengenai jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun, dan data jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja. Berdasarkan kedua jenis tersebut maka penduduk berusia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja, sedangkan kelompok kedua yaitu penduduk usia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja dikatakan bukan angkatan kerja (Sukirno, 2004).

Menurut Suprihanto (2002) perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dikatakan sebagai TPAK atau kependekan dari tingkat partisipasi angkatan kerja, apabila makin banyak penduduk usia kerja dan makin besar TPAK-nya maka jumlah angkatan kerja juga makin besar.

Gambar 2.1

Skema Ketenagakerjaan



Sumber: Berpendidikan.com

2.2.4 Pengeluaran Pemerintah

Menurut (Mangkoesubroto, 2008:169) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

2.2.4.1 Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah

a) Teori pengeluaran pemerintah Rostow

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan oleh investasi swasta yang sudah semakin besar pula. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada bentuk pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas social (Mangkoesoebroto, 2008:170).

b) Teori Hukum Wagner

Teori Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Wagner mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesubroto, 2008: 179).

c) Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes

Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Dengan demikian pengeluaran agregat dapat

dibedakan kepada empat komponen: konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan $Y=C+I+G$. Dengan demikian pendapatan nasional adalah Y .

Apabila perekonomian ini berubah menjadi terbuka maka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Apabila perekonomian menjadi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor neto yaitu, sebanyak $(X-M)$. Maka pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka yaitu $Y=C+I+G+(X-M)$. Dapat disimpulkan G dalam sebagai pengeluaran pemerintah

memiliki peran terhadap pencapaian kegiatan perekonomian melalui kebijakan pemerintah guna mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga pemerintah perlu menambah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan (Sadono Sukirno:2007:211) .

d) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar (Guritno Mangkoesobroto, 2008: 173).

2.2.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas:

- 1) Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- 2) Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Jumlah Mahasiswa Terhadap PDRB

Peningkatan jumlah mahasiswa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dampak yang positif terhadap PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan ketika pertumbuhan jumlah mahasiswa yang semakin banyak di Provinsi Daerah Yogyakarta maka akan menciptakan permintaan barang seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain-lain. Kemudian juga akan menciptakan permintaan jasa seperti, laundry, pengetikan, foto kopi dan masih banyak lagi. Ketika permintaan ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa maka aktivitas ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkat dan akan menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi atau nilai PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.3.2 Hubungan Investasi Terhadap PDRB

Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang an jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output

tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Sedangkan, *Dombush & Fisher* berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang. Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono, 1992). Menurut Todaro (1981) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi,

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, kecilnya jumlah mutlak kapita material. Kedua, terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk. Ketiga dan yang terakhir adalah rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan tersebut, Negara-negara berkembang mempunyai sumber daya yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dibidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (vicious circle) yang berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini

antara lain perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barangbarang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal output (*incremental Capital Output Ratio*). Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio penambahan modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan public di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (*eksternalitas positif*) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008).

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007).

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara (Prasetyo, 2009).

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan

produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang public maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.3.3 Hubungan Tenaga Kerja Terhadap PDRB

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari kerja (simanjuntak, 1985). Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985). Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya.

Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu peningkatan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed) atas tiga macam. Pertama, tenaga kerja penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang mempunyai jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed) yaitu tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.

Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja $0 \leq 1$ jam per minggu. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional yang cukup kuat. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang ikut serta berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi

kebutuhan masyarakat. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogeny dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K,L)$

diamana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternative antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal physical Product*).

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat akan memperlihatkan penurunan produktivitas serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi santosa, 2001).

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. (Kuncoro, 2004)

2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2008)

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah Mahasiswa berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Investasi berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

